



Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

HANGAT diperbincangkan saat ini terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Perlu

Ketidaklayakan Kebijakan Kenaikan Harga BBM

kita sadari bersama bahwa kebijakan kenaikan harga BBM sejatinya telah menjadi rutinitas kebijakan di era kepemimpinan presiden di Indonesia. Jika ditarik mundur, pertama, era Presiden Soeharto tercatat 3 (tiga) kali menaikkan harga BBM yakni tahun 1991, 1993 dan 1998. Kedua, era Megawati Soekarnoputri tercatat 2 (dua) kali menaikkan harga BBM, yakni tahun 2002 dan 2003. Ketiga, era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) tercatat 2 (dua) kali menaikkan harga BBM. Keempat, era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tercatat 3 (tiga) kali menaikkan harga BBM, mulai rentang tahun 2003 hingga 2008. Kelima, era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat 4 (empat) kali menaikkan harga BBM, antara tahun 2014 -

2022. Hanya era Presiden Soekarno dan era Presiden B.J. Habibie yang tidak memiliki catatan menaikkan harga BBM.

Jika dilihat dari fakta tersebut sejatinya kebijakan kenaikan harga BBM di Indonesia seolah telah menjadi suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan. Indonesia masih tergantung dengan perkembangan harga minyak dunia. Belum lagi karakteristik Indonesia yang masih menjadi negara pengimpor minyak juga memiliki pengaruh pada besaran pengeluaran negara terhadap konsumsi BBM. Maka sudah pasti ujungnya menyelamatkan APBN akan selalu menjadi alasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Perlu dipahami bersama bahwa alasan tersebut bukan lagi dalih namun keniscayaan. Dengan rutinitas kebijakan kenaikan harga

BBM yang tanpa disadari senyatanya kita alami di hampir setiap era kepemimpinan presiden, mengapa harus muncul gejala di benak rakyat? Pada titik kita harus menyepakati bahwa rakyat berhak untuk protes dan mengeluh. Perlu diingat bahwa negara terbentuk atas kehendak rakyat, sehingga fungsi utama negara adalah menjamin kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali. Ketika ada kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memberi ancaman pada kesejahteraan rakyat maka rakyat berhak protes.

Dalam pandangan ekonomi kesejahteraan, bahwa suatu kebijakan dianggap layak manakala kebijakan tersebut menguntungkan suatu pihak dan tidak ada suatu pihak pun yang merasa dirugikan. Sementara dalam kebijakan kenaikan harga

BBM di Indonesia masih memiliki kecenderungan berdampak muncunya sektor-sektor yang terancam dalam kondisi marginal. Sebut saja, sektor logistik berdampak pada potensi biaya distribusi logistik, sektor industri (makanan, otomotif, property, dan sebagainya) berpotensi naiknya harga produksi dan melemahnya daya beli masyarakat, sektor keuangan-perbankan berpotensi naiknya suku bunga acuan, hingga sektor transportasi berpotensi naiknya harga tarif angkutan umum. Sehingga kebijakan kenaikan harga BBM di Indonesia belum bisa dikatakan layak untuk diimplementasikan. Poin utamanya bahwa kebijakan kenaikan harga BBM di Indonesia cenderung mengarah pada situasi yang di klaim oleh rakyat sebagai situasi merugikan. Mengapa demikian? Menurut hemat penulis,



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

tidak mampu memberikan kepuasan bagi rakyat. Dari sisi bumper politik? Negara lupa bahwa rakyat sebagai infrastruktur politik. Legitimasi rakyat melalui opini publik, dialog publik hingga agenda publik akan menjamin kelayakan suatu kebijakan publik. Dalam kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah tampak melupakan peran dan keterlibatan rakyat sehingga kesekian kalinya kebijakan kenaikan harga BBM meskipun harus dilakukan namun tetap dinilai rakyat sebagai kondisi merugikan. Kebijakan terbaik adalah yang paling mampu menciptakan keberdayaan dan menghindarkan semua dari persepsi kesengsaraan. Demikian semoga dapat menjadi kritik positif khususnya untuk pemerintah.***

KPK..... Sambungan hal 1

dugaan korupsi suap pengurusan perizinan di Pemkot Yogyakarta untuk tersangka HS dan kawan-kawan.

Selain dua wiraswasta itu, lanjutnya, KPK juga memanggil satu saksi lainnya, yakni Procurement Manager PT Pesonna Indonesia Jaya Fitriyani.

Sementara itu dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, KPK memanggil dua notaris, Imam Zainal Arifin dan Maria Sophia.

Pemimpin..... Sambungan hal 1

Kerumunan pelayat pun datang berjajar di jalan-jalan pusat kota London untuk menyaksikan hari upacara pemakaman tersebut.

Sejak peti mati Ratu muncul, dibawa oleh para pembawa selubung, semua orang terdiam dan para bangsawan berbaris mengikuti suara bagpipe dan membunyikan lonceng.

Charles, Anne, Edward dan William, semuanya mengenakan seragam militer seremonial, memberi hormat saat peti mati diangkat dari gerbong senjata di depan biara.

Andrew dan Harry, yang bukan lagi menjadi bagian dari kerajaan, mengenakan pakaian jas biasa dan tidak memberi hormat, meskipun keduanya pernah bertugas dalam konflik di masa lalu, di Falklands dan di Afghanistan.

Setelah 11 hari perubahan dan aktivitas penting sejak ibunya meninggal, Charles tampak putus asa dan kelelahan saat para pengusung peti jenazah membawa peti mati ke biara melalui Pintu Barat Besar untuk upacara pe-

Pengajuan..... Sambungan hal 1

Baskara Aji mengatakan, berdasarkan data dan laporan yang diterimanya, sampai saat ini banyak pemanfaatan tanah kas desa yang penggunaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Gubernur DIY. Salah satunya mereka menyalahgunakan izin dari sisi keluasan dengan menggunakan lahan melebihi dari luas yang diizinkan. Misalnya izin yang dikeluarkan hanya 5.000 meter persegi tetapi yang dipakai lebih dari luas itu. Tidak hanya itu beberapa di antara mereka juga memanfaatkan izin tidak sesuai peruntukan.

Hentikan..... Sambungan hal 1

"Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka laringa ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada 'mix', tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelas Airlangga.

Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai perhektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.

"Dengan menggunakan GMO itu produksi perhektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton perhektare," lanjut Airlangga.

Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perlu-

Reformasi..... Sambungan hal 1

Perhelatan itu didesain khusus dalam rangka mempromosikan kalurahan (desa) sebagai basis Keistimewaan Yogya. Sebab dalam sejarahnya, perjuangan Keistimewaan Yogya banyak dimotori lurah dan dukuh. Kita tak pernah lupa bahwa jauh sebelum RUUK disahkan pada 2012, para lurah se-DIY sudah berjuang keras. Waktu itu jejaring para lurah memakai nama Gerakan Ismaya untuk level provinsi dan nama-nama unik seperti Semar (Gunungkidul), Suryondadari (Sleman), Badranaya (Bantul), dan Tunggul Jati (Bantul). Ke depan, Reformasi Kalurahan menjadi energi besar untuk memajukan Keistimewaan Yogya.

Karena itu Reformasi Kalurahan perlu digarap serius. Pertama, pembangunan berjenjang seperti pengembangan dari level Desa Budaya hingga Desa Mandiri Budaya perlu dikawal ketat. Sistem akreditasi seperti itu mendorong pemerintah dan masyarakat

kalurahan untuk berpacu dan berkompetisi secara progresif. Kedua, di luar sistem akreditasi itu, setiap kalurahan perlu didorong untuk menemukan keunikan masing-masing. Mungkin desa A mengembangkan diri sebagai desapreneur, desa B sebagai desa digital, desa C sebagai desa pendidikan. Wonokromo sendiri memiliki visi menjadi Desa Lumbung Ilmu Ke-Mataraman sesuai dengan sejarah dan potensi pendidikan lokal mereka yang dimotori oleh 29 Pondok Pesantren yang sangat aktif.

Ketiga, pembangunan kalurahan akan intensif bila dikerjakan secara kolaboratif. Event di Wonokromo itu sendiri merupakan kerja bareng banyak pihak seperti Balai Bahasa Yogyakarta (BBY), Yogya Development Forum (YDF), Duta Bahasa, Forum Duta Keistimewaan, Jejaring Syiar Global Mataram, dan tentunya pemerintah serta ekosistem elemen-elemen masyarakat setempat.

TRANSFER LEBIH MUDAH DAN HEMAT
Bank BPD DIY Luncurkan Fitur BI FAST

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY meluncurkan fitur Bank Indonesia Fast Payment (BI FAST), Selasa (20/9) hari ini. Melalui BI FAST, nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi antarbank melalui aplikasi Bank BPD DIY Mobile dengan biaya hanya Rp 2.500 pertransaksi.

"Nasabah juga makin memudahkan melakukan transfer dana antarbank karena jumlah transfer maksimal sampai Rp 250.000.000 pertransaksi perhari. Karena menggunakan aplikasi mobile banking, fitur BI FAST dapat diakses 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu secara real time," kata Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad, Senin (19/9).

Menurut Santoso Rohmad, implementasi BI FAST pada aplikasi Bank BPD DIY Mobile merupakan wujud nyata upaya Bank BPD DIY mendorong digitalisasi transaksi keuangan. Melalui transformasi digital optimis Bank BPD DIY mam-

pu meningkatkan performa bisnis dan daya saing serta memberikan layanan perbankan yang andal, cepat dan aman.

Untuk dapat menikmati layanan tersebut, nasabah cukup melakukan update aplikasi Bank BPD DIY Mobile di sistem Android, iOS, dan Huawei. Kehadiran BI FAST kian melengkapi layanan pada aplikasi Bank BPD DIY Mobile.

"Pengguna BPD DIY Mobile dapat mengakses beragam fitur perbankan digital. Seperti cek saldo



Bank BPD DIY meluncurkan fitur BI FAST untuk kemudahan nasabah.

dan mutasi, transfer online, pembayaran (retribusi, pajak daerah, pulsa, PDAM, iuran BPJS Kesehatan, pembayaran akademik, PLN), pembelian (paket data, token listrik, top up e-wallet), serta transaksi QRIS," terangnya.

Santoso menyatakan, aplikasi BPD DIY Mobile saat ini digunakan oleh 132.317 nasabah. Nilai transaksi periode Januari-Agustus 2022 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun dan frekuensi penggunaan lebih dari 2,2 juta transaksi.

Resmi..... Sambungan hal 1

Sidang KKEP Banding terhadap putusan pelanggaran etik FS digelar pukul 10.30 WIB. Sidang dipimpin perwira tinggi bintang tiga berpangkat Komjen dan wakil serta anggota sebanyak empat orang pati berpangkat inspektur jenderal.

Berdasarkan tayangan di Polri TV, hadir dalam Sidang KKP Banding, yakni Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahr Diantono dan Asisten Polri bidang SDM Irjen Pol Wahyu Widada. Sidang KKEP Banding ini tidak dihadiri FS, selaku terdakwa.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, pelaksanaan Sidang KKEP Banding FS sudah dituntaskan, kemarin. Setelah putusan banding akan ditin-

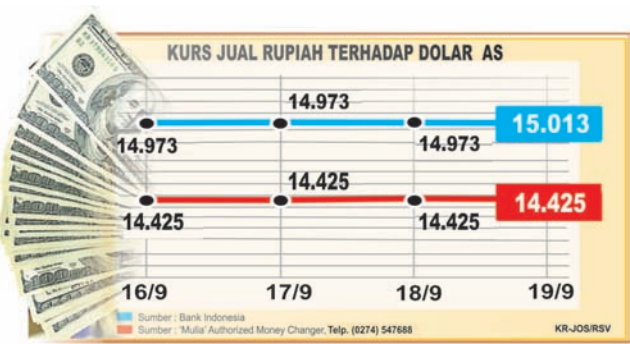
PSIM..... Sambungan hal 1

Hanya saja, memang hasil yang diharapkan belum bisa diraih pada laga ini. "Bicara hasil, memang belum mendapatkan hasil maksimal. Tapi pemain sudah bermain maksimal," jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan perwakilan pemain, Sunni Hizbullah yang memohon maaf kepada seluruh pendukung PSIM, baik yang hadir langsung di laga tersebut atau yang ada di Yogyakarta karena belum memberikan hasil kemenangan di laga ini. "Untuk supporter dan pendukung PSIM, karena kami belum bisa membawa pulang tiga poin. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, dan semoga di pertandingan selanjutnya bisa meraih poin penuh," tegasnya.

Pada laga kemarin, PSIM Yogyakarta yang tampil tanpa didampingi pelatih utama setelah kerja sama dengan Imran Nahumarury dihentikan, tampil dengan sejumlah perubahan komposisi pemain. Nama-nama pemain yang sebelumnya akrab dengan kiper pemain cadangan, seperti Eli Nasoka, Izmy Yaman Hatuwe dan Andre Agustiari, tampil sejak menit awal, termasuk rekutan an- yar Cristian Gonzales.

Para penggawa Laskar Mataram yang pada laga ini dipimpin caretaker pelatih,



Prakiraan Cuaca				Selasa, 20 September 2022	
Lokasi	Cuaca			Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	
Bantul					23-31 70-95
Sleman					23-30 75-95
Wates					23-31 70-95
Wonosari					23-30 70-95
Yogyakarta					23-31 70-95
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir	